

Kantongi 2 Calon Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi Gedung IGD dan Poliklinik

SALATIGA — Pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung IGD dan Poliklinik Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 oleh Kejaksaan terus berlanjut. Menariknya, ada perbedaan informasi mengenai penetapan tersangka kasus ini.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng melalui Humas Eko Suwarni saat dikonfirmasi wartawan menyebut, pihaknya telah mengantongi dua nama yang potensial untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk nama tersangka, memang belum umumkan terlebih dahulu. Nanti saja itu ya," kata Eko ketika dihubungi wartawan melalui telepon pribadinya.

Terkait supervisi yang dilakukan Kejati, Eko menegaskan, kasus tersebut tetap ditangani Kejari Salatiga.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Salatiga Andie Saputra ditemui di ruang kerjanya Senin (25/11) menuturkan, supervisi sebagai upaya mem-*follow up* kasus-kasus yang tengah ditangani pihaknya. Termasuk, proyek pembangunan gedung IGD dan Poliklinik Tahun-Anggaran (TA) 2004 dan 2005.

Terkait adanya penetapan tersangka kasus tersebut,

Kajari Darmo Widjojo menampik. Ia menegaskan, belum ada tersangka kasus tersebut.

"Kami yang menangani dan belum ada tersangka dalam kasus ini," jelas Darmo saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Alasan Darmo, Kejari masih menunggu hasil audit terkait jumlah kerugian negara. Jika audit kerugian negara sudah turun, lanjut Darmo, hal itu akan menjadi dasar penetapan ada tidaknya tersangka.

"Kita berjalan sesuai tahapan. Penetapan tersangka menunggu dasarnya, yakni hasil audit," jelas dia.

Seperti diberitakan *Radar Semarang* sebelumnya, kasus ini mencuat seiring temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DI Jogjakarta dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD dan Poliklinik RSUD 2004 dan 2005. Ada kelebihan bayar ke PT Kuntjup senilai sekitar Rp 1,09 miliar.

Hasil pemeriksaan proyek pembangunan IGD dan Poliklinik RSUD Salatiga tahun anggaran 2004 ditemukan kelebihan bayar senilai Rp 887,475 juta.

Kemudian, pada pelaksanaan pembangunan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2005, BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 145,549 juta.

Selain itu, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak perlu. Akibatnya, negara dirugikan Rp 57,785 juta. (sas/isk/ce1)